

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Arus globalisasi saat ini semakin kuat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan globalisasi ini tidak saja memberikan keuntungan (dampak positif), tetapi juga memberikan pengaruh yang buruk (dampak) terhadap sikap masyarakat, khususnya kalangan generasi muda. Dampak positif dari perkembangan globalisasi di antaranya komunikasi yang semakin cepat dan mudah, mudahnya memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, serta menunjang dalam peningkatan perekonomian.

Namun sebaliknya, dampak yang ditimbulkan dari globalisasi diantaranya adalah timbulnya sikap yang lebih menyukai budaya asing, lahirnya sikap, kurangnya rasa solidaritas, kurangnya jiwa gotong royong, kurangnya kepedulian dan kesetiakawanan terhadap, dan semakin lunturnya eksistensi budaya bangsa, serta mendorong potensi ancaman diantaranya terorisme, radikalisme, seperatisme, pemberontakan bersenjata, serangan *cyber* dan *spionase*, peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

Globalisasi tidak dapat dipungkiri dapat memberi pengaruh peningkatan yang tidak sedikit kepada generasi muda di masa kini, terutama dalam aspek nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Hal ini ditunjukkan dengan sikap masyarakat yang cenderung apatis, lebih menyukai budaya asing ketimbang budaya bangsa sendiri, menggeser nilai-nilai ketimuran menjadi kebarat-baratan, dan lain-lain (Wulandari, Yayang, dan Dinie, 2021). Rendahnya moral bangsa menjadi salah satu benturan dari globalisasi yang sangat meresahkan bangsa Indonesia. Pada abad ini, meningkat seluruh generasi muda terkena dampak dari arus globalisasi. Tidak sedikit generasi muda di Indonesia yang kecanduan

gadget dan media sosial. Kecanduan dari merupakan salah satu dampak globalisasi yang mengikis nasionalisme Pancasila pada generasi muda.

Masalah nasionalisme tentu bukan sesuatu yang bisa dinormalisasi, mengingat nasionalisme adalah wujud persatuan dan kesatuan. Nasionalisme ini merupakan pembeda antara generasi yang sekarang dibandingkan generasi sebelumnya. Kala itu, mereka rela mempertaruhkan nyawa demi melawan kolonialisme serta guna persatuan bangsa, yang berwujud sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 (Widiyono, 2019).

Globalisasi tidak hanya menjadi sorotan di Indonesia, bahkan di luar negeri menyangkut pada isu kemungkinan datangnya pesaing-pesaing dari negara maju yang ikut bersaing dalam perekonomian liberal dunia. Hal ini dapat memberikan dampak pada semua bidang kehidupan sosial dan ekonomi serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena munculnya konflik. Hal tersebut menjadi masalah mendasar dalam era globalisasi, yaitu kompetisi (persaingan ekonomi) serta kondisi lain yang mengikuti perekonomian, serta ancaman atas persatuan bangsa. Pengaruh globalisasi cenderung sulit untuk dicegah dan memerlukan perhatian atas beberapa kemungkinan tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang ada serta kebijakan dan strategi untuk menanggulangnya. Indonesia, tentu saja diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya mewaspadaai berbagai kemungkinan tantangan globalisasi (Yuniarto, 2014). Secara spesifik, Yuniarto (2014) menambahkan jika masalah dan tantangan globalisasi di Indonesia dapat berbentuk kejahatan transnasional selain non-negara, percepatan kapitalisme, intervensi dan pelemahan kekuasaan negara, bencana kerusakan lingkungan, keamanan manusia, ketahanan budaya atau pelestarian budaya.

Kondisi ini menuntut adanya kesadaran bela negara dari seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran bela negara merupakan modal utama dalam menopang keutuhan NKRI tetap terwujud. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI 2014-2019, Jenderal (Purn) TNI

Dr. Ryamizard Ryacudu dalam kegiatan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila pada 12 Agustus 2017. Ryamizard Ryacudu menjelaskan bahwa hanya satu kata kunci kekuatan RI dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi baru, yaitu dengan cara memperkuat identitas bangsa serta membangun persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh komponen bangsa melalui penguatan kesadaran bela negara dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Urgensi mengenai nilai-nilai kebangsaan selaku modal kekuatan dan pengikat persatuan sehingga Bangsa Indonesia berhasil dalam menghadapi setiap tantangan dalam era globalisasi. Bela Negara dan semangat kebangsaan menjadi modal masyarakat untuk mempunyai karakter dan mentalitas sebagai bangsa. Bela negara tersebut juga diharapkan akan dapat diikuti dengan karakter kepemimpinan, disiplin, kerja sama agar turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan kesadaran bela negara ini, semua elemen masyarakat akan memiliki kesadaran dalam mengamankan dan melestarikan jati diri, budaya dan kekayaan alam tersebut, termasuk juga upaya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa (Kemhan, 2017).

Kegiatan bela negara dapat dilakukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat mulai dari peduli terhadap keluarga dan institusi tempat bekerja, saling menghargai dalam memanfaatkan media sosial, menjadi motor penggerak dalam mengatasi kesulitan, cinta kepada produksi dalam negeri sampai dengan ikut pelatihan dasar kemiliteran.

Kegiatan PKBN dimaksudkan untuk membangun sikap mental dan karakter warga negara yang merujuk pada nilai-nilai dasar bela negara. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya revolusi mental dengan sasaran karakter bangsa. Amanat dalam UUD 1945 menunjukkan jika sikap bela negara itu menjadi hak dan kewajiban oleh setiap warga negara.

Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dengan sistim pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer dan non militer. Pada pasal 20 Ayat (2)

dan (3) mengamanatkan bahwa segala sumber daya nasional dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan.

Pada awal Oktober 2015, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia membuat perencanaan program raksasa “Bela Negara” yang diberlakukan bagi warga Indonesia dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai umur 50 tahun, dengan jumlah peserta 100 juta orang dengan target waktu 10 tahun. Setelah separuh perjalanan, kader bela negara yang berhasil dibentuk melalui Badiklat dan Lemdik jajaran Kodam (Rindam) sebanyak 83 juta. Pro-kontra mengiringi awal kebijakan ini, yang mengemukakan seputaran adalah substansi program ini antara militerisme dan nonmiliterisme murni penanaman nilai-nilai kesadaran bela negara berdimensi *soft power*, komposisi materi pembelajaran antara kegiatan fisik dan non fisik serta anggaran yang harus disediakan apabila diperkirakan para peserta calon kader bela negara membutuhkan sekurangnya 10 juta rupiah berarti negara harus mengeluarkan dana sekitar 500 trilyun serta permasalahan regulasi, peran instansi terkait dan keterbatasan sarana prasarana pendukungnya (Setiono, 2017).

Ditambahkan oleh Priyatno bahwa salah satu upaya membangun daya tangkal bangsa dilaksanakan melalui PKBN kepada setiap warga negara, agar tercipta warga negara yang memiliki sikap mental dan karakter yang dijiwai oleh nilai-nilai dasar bela negara. Tahun 2020 s.d 2024 merupakan sasaran pada lima tahun kedua (*Grand Design* PKBN) dimana jika kebijakan pelaksanaan PKBN yang difokuskan pada penguatan manajemen PKBN, kemampuan dan kesadaran Bela Negara yang dipadukan dengan fungsi K/L, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya, dengan indikator tercapainya kader Bela Negara sebanyak 50% dari jumlah penduduk (Priyatno, 2019)

Selanjutnya, atensi terhadap kegiatan penanaman kesadaran bela negara pernah dicanangkan skala nasional oleh Presiden RI Bapak H. Joko

Widodo dengan gelaran Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019 (tertuang dalam Instruksi Presiden No. 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara) telah menunjukkan hasilnya yaitu 87 juta kader bela negara (Kader Muda Bela Negara, Kader Pembina Bela Negara, Pelatih) terbentuk dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan aksi nasional yang ditetapkan pemerintah, di lingkup Kodam sendiri, staf territorial kodam semenjak tahun 2017 telah melaksanakan program kegiatan sosialisasi bela negara dengan capaian 5.094 menysasar berbagai kalangan diantaranya; Pelajar, Mahasiswa, Kader bela negara, Satpam serta perusahaan swasta dan BUMN, sementara pada tahun 2018, kegiatan serupa oleh Staf Teritorial Kodam mengalami peningkatan 18,3 % yaitu mencapai sasaran 7.374 orang.

Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/106/XI 1/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Teritorial TNI AD, rumusan pemberdayaan wilayah tidak terlepas dari obyek penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI AD itu sendiri yaitu membina potensi Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial setempat menjadi kekuatan, ruang dan alat juang untuk pertahanan, pada dasarnya merupakan pemberdayaan masyarakat dan lingkungannya. Namun demikian, didalam pelaksanaannya pemberdayaan wilayah yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan dirasa belum optimal. Hal ini disebabkan terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan bela negara masih sangat terbatas.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018 – 2019 TNI turut menjadi bagian dalam aksi nasional ini dalam sosialisasi pembangunan kesadaran bela negara di berbagai kalangan masyarakat dan berbagai kawasan. Pelaksanaan program bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah memang tidak dapat lepas dari peran TNI dalam hal ini melalui satuan di bawah Kodam Jaya yang melaksanakan pembinaan 5ngkatan5n5 meliputi Kodam Jaya terdiri dari 2 Korem dan 1 Kodim berdiri sendiri dengan

pembagian wilayah sebagai berikut: Kodim 0501/Jakarta Pusat (BS) Korem 051/Wijayakarta (WKT) di Bekasi, 11 satuan setingkat batalyon dan Rindam dengan tugas terbatas menjalankan tugas dan perannya pada peningkatan kesadaran bela negara yaitu melalui program wawasan kebangsaan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

Pelibatan gelar perangkat Komando Kewilayahan yaitu Kodam-Kodam (Korem, Rindam, Kodim dan Koramil) serta skala terbatas Satpur dan Banpur diimplementasikan pada kegiatan pembinaan kader bela negara yang dilakukan oleh Kodam Jaya dalam program kerja yang dilaksanakan oleh jajaran Kodam Jaya. Tugas pokok dan fungsi pembinaan bela negara kalangan masyarakat berkaitan keberadaan Kodam selaku pimpinan Komando Kewilayahan di daerah dijalankan dibawah Staf Teritorial Kodam. Peran kita berhubungan dengan tugas tersebut adalah merencanakan, melakukan pembinaan, memonitoring pelaksanaan kegiatan bela negara yang dilaksanakan oleh Staf Badan Pelaksana Kodam (Sintel, Sops, Spers, Ster) satuan jajaran Komando Kewilayahan (Korem, Kodim, Koramil), Satuan Tempur (Brigif dan jajarannya dan batalyon-batalyon dibawah Korem) dalam konteks pembinaan terbatas, Satuan Bantuan Administrasi (Ajen, Pendam, Bintal), Satuan Lembaga Pendidikan (Rindam).

Keseriusan TNI dalam mewujudkan cita-cita negara dapat dilihat dalam lingkup Satuan Kewilayahan Kodam Jaya yang merupakan Kompartemen Strategis Pertahanan TNI AD untuk menghadapi segala bentuk ancaman baik dari luar maupun dalam negeri terdiri dari 2 Korem dan 1 Kodim BS. Kodam Jaya juga memiliki satuan tempur dan pendidikan yang dilaksanakan oleh Rindam Jaya (Resimen Induk Kodam Jaya) memiliki tugas pokok dalam membentuk dan melatih prajurit menjadi suatu Angkatan bersenjata yang memiliki sifat profesionalisme, kemiliteran serta kejuangan yang tinggi guna menghadapi setiap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun Rindam Jaya sendiri membawahi beberapa

satuan, diantaranya: Satuan Dodik Latpur, Satuan Dodik Kejuruan, Satuan Sekolah Calon Bintara, Sekolah Calon Tamtama, dan Dodik Bela Negara (Mariana, 2019). Lebih lanjut keterlibatan Rindam Jaya dalam program Bela Negara sebenarnya juga sudah diatur Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 61 Tahun 2015 dimana Rindam Jaya dalam hal ini mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan Dodik Bela Negara, baik dalam perencanaan program, penyiapan sarana dan prasarana, tenaga pendidik hingga tahap evaluasi program.

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara dijelaskan indikator keberhasilan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara kepada masyarakat yaitu: Terbangunnya pemahaman tentang urgensi bela negara, termasuk juga cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada ideologi Pancasila dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. Hal tersebut sejalan dengan nilai dasar dalam bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia dengan luas wilayah keseluruhan 7.639,84 km<sup>2</sup>, meliputi 662,33 km<sup>2</sup> daratan, termasuk 110 pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan 6.977,5 km<sup>2</sup> lautan (BPS DKI, 2020). Berdasarkan data BPS tahun 2019, pemuda meningkat seperempat jumlah penduduk DKI Jakarta. Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta didominasi penduduk usia produktif (15-64). Usia penduduk di DKI Jakarta paling banyak berada di atas 30 tahun, kemudian dilanjutkan di usia kurang dari 16 tahun (BPS DKI, 2020).

Di sisi lain, dibandingkan dengan gelar TNI sebagai komponen utama yang ada di Provinsi DKI Jakarta saat ini, kekuatan TNI sangat tidak sebanding dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab TNI dan potensi ancaman yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan komponen cadangan yang dapat membantu guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman.

Disamping rasio perbandingan anggota TNI dengan luas wilayah yang tidak memadai, rasio jumlah penduduk dengan anggota TNI juga tidak seimbang. Sedangkan ancaman yang muncul cenderung ancaman non tradisional, sehingga untuk dapat mengontrol perkembangan ancaman non tradisional diperlukan upaya pembinaan Bela negara.

Caballero (2016) menjelaskan bahwa dalam isu keamanan non tradisional dapat muncul dari kondisi sosioekonomi maupun politik yang dapat menimbulkan instabilitas pada sektor kehidupan. Target keamanan juga bukan hanya negara saja, tapi juga melibatkan manusia. Sebagai contoh bahwa, kejadian yang dilaporkan dalam Tim Detik (2022) dimana pada tanggal 29 Mei 2022, terjadi konvoi angkatan “Khilafatul Muslimin” di Cawang yang membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar. Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut dibawa peserta konvoi. Ada poster yang berbunyi pesan lainnya seperti, “Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah” atau “Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah”. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan menyatakan jika konvoi berbendera khilafah tidak dibenarkan di Indonesia. Pasalnya, Indonesia tidak menganut sistem Khilafah dalam bernegara. Ideologi yang disebar selain Pancasila di Indonesia dapat mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya ideologi khilafah yang bisa saja diserap oleh banyak masyarakat.

Kemudian, potensi ancaman pertahanan di Provinsi DKI Jakarta lebih cenderung berupa ancaman pertahanan non-tradisional. Hal ini mengingat DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan sebuah pusat segala aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari pusat pemerintahan nasional beserta pemerintahan administratif dibawahnya, pusat perdagangan dan jasa, finansial, rekreasi, serta pusat perekonomian. Dengan segala kompleksitasnya Jakarta menghasilkan banyak ancaman non-tradisional seperti ancaman lingkungan hidup yang tercemar akibat polusi udara, air dan tanah; kemacetan, banjir, banyaknya permukiman

kumuh, kemiskinan, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba hingga ancaman siber.

PKBN yang diusung Kemhan RI, K/L terkait dan Pemda serta komponen bangsa lainnya masih belum memenuhi harapan. Hal ini karena PKBN yang dibangun masih belum terpadu dan *komprehensif*. Maka dalam rangka upaya menyatukan dan mensinergikan kinerja kementerian dan lembaga, diperlukan suatu alur koordinasi guna pembentukan Kader Bela Negara agar dapat menghalau dampak negatif dari ketidakhadiran PKBN, khususnya di DKI Jakarta.

Secara khusus kondisi di DKI Jakarta sebagai lokus dalam penelitian terhadap pengembangan pembinaan bela negara adalah karena masih tingginya ancaman yang bersifat multidimensional terhadap kesadaran bela negara, hal ini akibat dari globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat yang berdampak pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat. Adanya kemudahan mengakses informasi dan penyebaran berita hoaks bahkan sampai pada penyebaran paham radikalisme, intoleransi dan terorisme.

Ancaman yang menjadi bentuk kurangnya kesadaran bela negara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ditunjukkan pada peristiwa berikut ini:

- a. Ditangkapnya sebanyak 15 tersangka kasus dengan tindak pidana terorisme dengan latar belakang pegawai negeri sipil atau PNS oleh Densus 88 pada 15 Maret 2022. Kelompok Jamaah Islamiyah ini berada di wilayah Satgaswil DKI Jakarta (Pradila, 2022). Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyatakan jumlah pelaku yang berhasil ditangkap Polri pada 2021 sebanyak 370 orang. Catatan ini naik sebesar 138 orang dari yang berhasil ditangkap pada 2020 sebanyak 232 orang (Rachman, 2022).
- b. Sebanyak 40 masjid di DKI Jakarta yang dicurigai disusupi paham radikal dan intoleransi (Ronald, 2018). Radikalisme ini juga menyebar di seluruh pesantren di Indonesia, dimana menurut laporan BNPT sebanyak 198 pesantren dicap terafiliasi jaringan teroris. Adapun

beberapa jaringan teroris yang dimaksud BNPT seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), hingga Mujahidin Indonesia Timur (MIT) (CNN, 2022).

- c. Banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) di luar negeri. BNPT mencatat ada 2.127 WNI yang menjadi FTF di Irak dan Suriah, 35 WNI menjadi FTF di Filipina, dan 23 orang WNI menjadi FTF di Afghanistan (Ramadhan, 2022).
- d. Selain kasus narkoba, terdapat jenis tindak pidana lain berupa tawuran yang kerap kali terjadi juga di Jakarta. Tawuran yang terjadi bisa berupa tawuran antar pelajar atau tawuran antar warga. Tawuran antar warga dapat terjadi dengan berbagai alasan, misalnya perebutan lahan parkir atau peredaran narkoba serta kurangnya perhatian dari orang tua kepada remaja (BPS DKI, 2020). Tawuran yang terjadi antara lain:
  - 1) Tawuran siswa Sekolah Dasar (SD) di kawasan Jalan Taruna Jaya, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat, 28 Januari 2022.
  - 2) Tawuran antar remaja di Jalan Kotam Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu 9 Februari 2022.
  - 3) Tawuran antar remaja di dekat Apotek Roxy Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat pada Minggu 20 Maret 2022.
  - 4) Tawuran pemuda yang menewaskan satu orang di Jalan RC Veteran Bintaro, Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 23 Maret 2022.

Dari berbagai kondisi yang ada khususnya di wilayah DKI Jakarta saat ini, tentunya menjadi suatu yang penting bagi pemerintah daerah/Kota dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Rentannya persatuan dan kesatuan bangsa sangat berhubungan erat dengan menurunnya semangat nasionalisme dan patriotisme warga negara. Oleh karenanya perlu diupayakan bagaimana meningkatkan dan menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya di

DKI Jakarta melalui pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa khususnya dalam mengantisipasi arus globalisasi.

Permasalahan lainnya adalah sebagai instansi di DKI Jakarta belum memiliki keseragaman kurikulum dan modul ajaran bela negara, hal ini tentunya berkaitan pemerintah pusat sebagai *leading sector* dalam pembinaan kesadaran bela negara secara nasional.

Selain itu, belum adanya regulasi yang komprehensif dalam pembinaan kesadaran bela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata dari musuh. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bela negara memiliki unsur yang mampu menjamin tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup elemen-elemen negara yang secara langsung menyentuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga elemen negara tersebut harus dimantapkan dalam rangka mendukung dan mengobarkan semangat bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dinamika global, regional, dan nasional yang berkembang dewasa ini, mempengaruhi pola dan bentuk peluang dan ancaman bagi bangsa Indonesia, menuntut adanya pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi, didasari pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta yakin dengan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, upaya sesungguhnya fungsi pertahanan akan efektif, jika seluruh warga negara Indonesia ikut berperan serta. Agar warga negara Indonesia memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban melakukan pembelaan negara yang berdaya tangkal tinggi tersebut, diperlukan berbagai upaya agar seluruh warga negara Indonesia memiliki cara pandang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan saling melindungi antar warga, serta berperan aktif dalam pergaulan dunia. Hal inilah yang

mendorong perlunya diadakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya mereka yang berada di ibukota negara.

Meskipun terjadi banyak pro dan kontra dalam menyikapi Bela Negara, namun berbagai upaya telah dilaksanakan khususnya oleh Kodam Jaya untuk menghilangkan isu negatif dalam memandang bela negara. Dukungan anggaran dalam melaksanakan PKBN menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan PKBN khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, Kodam Jaya tetap melaksanakan PKBN melalui aplikasi *zoom meeting* untuk menghemat dana. Selain itu, Kodam Jaya yang dibantu oleh satuan Korem dan Koramil masuk sebagai mitra untuk menyasar oknum-oknum yang kontra pada ide Bela Negara. Hal ini dilaksanakan dengan menjaring berbagai pihak untuk dilatih PKBN di Makodim terkait dan menjadikannya Kader Bela Negara. Sehingga, pihak yang kontra pada Bela Negara akan lambat laun menerima ide Bela Negara ditambah dengan program Kampung Pancasila yang disebar di berbagai titik sebagai bentuk pencegahan dari tindakan-tindakan negatif lainnya.

Berdasarkan temuan awal penelitian yang dijalankan, bahwa pembentukan Kampung Pancasila di DKI Jakarta cukup memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat. Dasar pengusulan guna pembentukan Kampung Pancasila ialah karena sangat beragamnya suku bangsa, etnis, budaya, dan agama, dari 11 Juta Penduduk di Provinsi DKI Jakarta, maka masyarakat harus mendapatkan wadah dan media, sebagai akses internalisasi dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila, secara berkesinambungan. Keberadaan Kampung Pancasila, diharapkan akan dapat lebih menangkal dan meminimalisir potensi konflik antar penduduk, dimana potensi penurunan indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar 72,20, serta juga dapat lebih memagari masuknya paham radikalisme dan terorisme, mencegah peredaran narkoba, atau bahkan memberikan sarana bagi masyarakat millennial guna memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi

lingkungan sekitar. Selain itu, strategi yang akan dijabarkan dalam penelitian ini terkait dengan PKBN secara umum dapat dioptimalisasi dengan upaya penguatan pada pendidikan formal dan informal, intensitas ceramah dan keteladanan, diklat, seminar dan FGD, serta media komunikasi, informasi, internet, dan permainan *online* sehingga memberikan novelty bahwa hal tersebut akan mengarah pada masyarakat yang memiliki kesadaran bela negara dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi guna mendukung pertahanan negara.

Dengan mempertimbangkan potensi ancaman yang ada di DKI Jakarta serta mengingat permasalahan pembinaan kesadaran bela negara yang ada saat ini, maka strategi pengembangan pembinaan bela negara di wilayah Kodam Jaya menjadi urgensi bagi upaya pertahanan yang Tangguh dalam menghadapi ancaman potensial militer dan non-militer yang terus berkembang di abad 21. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Optimalisasi Strategi Kodam Jaya dalam Penguatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Menghadapi Tantangan Globalisasi untuk Kepentingan Pertahanan Negara**

## **1.2. Fokus dan Subfokus**

### **1.2.1. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah Optimalisasi Strategi Kodam Jaya dalam Penguatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Menghadapi Tantangan Globalisasi Untuk Kepentingan Pertahanan Negara.

### **1.2.2. Subfokus Penelitian**

Subfokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan kesadaran bela negara oleh Kodam Jaya di wilayah kerjanya.

- b. Optimalisasi Strategi Kodam Jaya dalam melaksanakan penguatan pembinaan kesadaran bela negara menghadapi tantangan globalisasi untuk kepentingan pertahanan negara.

### 1.3. Rumusan Masalah

Rentannya persatuan dan kesatuan bangsa sangat berhubungan erat dengan menurunnya semangat nasionalisme dan patriotisme warga negara. Oleh karenanya perlu diupayakan bagaimana meningkatkan dan menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya di DKI Jakarta melalui pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa khususnya dalam mengantisipasi arus globalisasi.

Permasalahan lainnya adalah di DKI Jakarta belum memiliki kurikulum dan modul ajaran bela negara, hal ini tentunya berkaitan pemerintah pusat sebagai *leading sector* dalam pembinaan kesadaran bela negara secara nasional.

Selain itu, belum adanya regulasi yang komprehensif dalam pembinaan kesadaran bela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata dari musuh. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bela negara memiliki unsur yang mampu menjamin tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup elemen-elemen negara yang secara langsung menyentuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga elemen negara tersebut harus dimantapkan dalam rangka mendukung dan mengobarkan semangat bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan mempertimbangkan potensi ancaman yang ada di DKI Jakarta serta mengingat permasalahan pembinaan kesadaran bela negara yang ada saat ini, maka strategi pengembangan pembinaan bela negara di wilayah Kodam Jaya menjadi urgensi bagi upaya pertahanan yang Tangguh

dalam menghadapi ancaman potensial militer dan non-militer yang terus berkembang di abad 21. Dari rumusan permasalahan tersebut, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kodam Jaya?
- b. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan pembinaan kesadaran bela negara?
- c. Bagaimana optimalisasi strategi Kodam Jaya dalam penguatan pembinaan kesadaran bela negara untuk menghadapi tantangan globalisasi guna kepentingan pertahanan negara?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kodam Jaya.
- b. Untuk menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan pembinaan kesadaran bela negara.
- c. Untuk merumuskan optimalisasi strategi Kodam Jaya dalam penguatan pembinaan kesadaran bela negara untuk menghadapi tantangan globalisasi guna kepentingan pertahanan negara.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan baik secara teoritis maupun praktis bagi kalangan akademisi maupun praktisi yang berkaitan dengan Pertahanan Negara, khususnya Strategi dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai sumber referensi ilmiah sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta pengembangan keilmuan di Program Studi Strategi Perang Semesta.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pertimbangan (*policy research*) bagi Kemhan RI, Mabes TNI, Kodam Jaya serta jajarannya tentang strategi pengembangan pembinaan bela negara, sehingga dapat dicapai pembinaan pertahanan negara yang berdaya tangkal dalam menghadapi tantangan globalisasi.